



DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG



CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA (PK) TRIWULAN I TAHUN 2021



<http://dinsos.bulelengkab.go.id>



dinsos@bulelengkab.go.id



(0362) 21248



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen



Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 5 April 2021

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM.

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053



DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	2
1.3 Tujuan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	3
BAB II CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA ..	5
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama	10
BAB III PENUTUP	12

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistematik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan system manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkennaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan



yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Penetapan Peraturan Bupati ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana
 - b. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga



- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
- 4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
- 5. UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan
 - b. Kepala Tata Usaha UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan

1.3. Tujuan Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja

Capaian Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Capaian Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah



- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD

Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 dalam pencapaian Misi 1 yaitu :

Tabel 2.1.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i>			
MISI I : Memantapkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin.	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.• Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS.	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial.• Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.



Tabel 2.1.2

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Buleleng

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.	Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang tertangani	2,75%	5,80%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinsos
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial .	Sosial	Dinsos
	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS.	Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,28%	20,55%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Sosial	Dinsos
						Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	Sosial	Dinsos



A. Strategi Dan Arah Kebijakan

Sebagai penjabaran dan penerapan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menetapkan strategis dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2017-2022, sebagai berikut :

1. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa strategi pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai upaya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara optimal yaitu : **Peningkatan Aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan Peningkatan Perlindungan sosial serta pemberdayaan usaha ekonomi bagi PMKS**, melalui :

- a. Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial.
- b. Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
- d. Menyelenggarakan perlindungan sosial , pemberdayaan dan pengembangan sosial.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya



kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pembangunan.

Penetapan kebijakan akan dapat mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana seluruh elemen mengetahui tentang apa peran dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan arah kebijakan pembangunan bidang sosial adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi PMKS** melalui meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS/Masyarakat miskin** melalui Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.
- 3. Meningkatkan potensi sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme** melalui meningkatkan dan memperkuat nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam memantapkan revolusi mental bagi generasi muda dan masyarakat .



Tabel 2.1.3

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsi sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial.	Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial .
Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan PSKS dalam Penanganan PMKS.	Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan peran aktif dan profesionalisme pelayanan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha terhadap PMKS sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial .
Meningkatnya Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.	Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Meningkatkan potensi dan sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.



2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasannya dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan



sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja sebagai Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja).



BAB III

PENUTUP

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah dicapai pertriwulan tahun 2021. Dengan Dokumen Capaian Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat melaporkan keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasanya dan kepada masyarakat.

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*Good Governance*) atau Pemerintah yang berdayaguna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab



**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I DINAS SOSIAL KABUPATEN BULENG
TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	Program	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Percentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	% 0,63	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	0,00	0,00	0,00		Program Pemberdayaan Sosial	842.624.600	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	185.828.941 411.434.663 588.649.655 842.624.600	53.635.450	28,86			
					0,15												
					0,30												
					0,63												
				Program Rehabilitasi Sosial					974.144.630	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	168.853.239 406.424.096 579.539.698 974.144.630	40.400.000	23,93				
				Program Penanganan Bencana					346.563.140	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	136.955.131 178.351.049 227.476.667 346.563.140	327.417.360	239,07				
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial					179.040.860	Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4	42.928.077 106.625.014 150.144.751 179.040.860	10.800.000	25,16				

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	Program	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.	% 80	Tw 1	0	0,00	0,00			Program Penanganan Bencana	346.563.140	Tw 1	136.955.131	-	-	
					20							Tw 2	178.351.049			
					40							Tw 3	227.476.667			
					80							Tw 4	346.563.140			
				Tw 4						Program Pemberdayaan Sosial	842.624.600	Tw 1	185.828.941	53.635.450	28,86	
												Tw 2	411.434.663			
												Tw 3	588.649.655			
												Tw 4	842.624.600			

Singaraja, 5 April 2021

Kepala Dinas Sosial Kab. Buleleng

Putu Kariahan Putra,S.Sos,MM

Pemimpin Tk.I (IV/b)

NIP.196912311991031053



CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin															
1	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	Tw 1	100	100	100		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	842.624.600	Tw 1	185.828.941	53.635.450	28,86	
					Tw 2	100						Tw 2	411.434.663			
					Tw 3	100						Tw 3	588.649.655			
					Tw 4	100						Tw 4	842.624.600			
C	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial															
1	Terwujudnya Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	Tw 1	100	100	100		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	342.663.440	Tw 1	136.955.131	20.900.000	15,26	
					Tw 2	100						Tw 2	178.351.049			
					Tw 3	100						Tw 3	223.576.967			
					Tw 4	100						Tw 4	342.663.440			
										Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	3.899.700	Tw 1	-	-	-	
												Tw 2	-			
												Tw 3	3.899.700			
												Tw 4	3.899.700			
										Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	179.040.860	Tw 1	42.928.077	10.800.000	25,16	
												Tw 2	106.625.014			
												Tw 3	150.144.751			
												Tw 4	179.040.860			
										Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.296.107.325	Tw 1	352.785.308	129.059.800	36,58	
												Tw 2	596.038.259			
												Tw 3	1.090.626.831			
												Tw 4	1.296.107.325			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
D	Kepala Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial															
1	Terwujudnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	Tw 1	100	100	100		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	827.024.630	Tw 1	134.657.570	30.200.000	22,43	
					Tw 2	100						Tw 2	319.276.480			
					Tw 3	100						Tw 3	454.784.390			
					Tw 4	100						Tw 4	827.024.630			
										Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	147.120.000	Tw 1	34.195.669	10.200.000	29,83	
												Tw 2	87.147.616			
												Tw 3	124.755.308			
												Tw 4	147.120.000			

Singaraja, 5 April 2021
Kepala Dinas Sosial Kab. Buleleng

I Putu Karimana Putra,S.Sos,MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.196912311991031053



CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja							Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
A.	Sekretariat																	
1.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan																	
1	Tersedianya Dokumen administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Adminstrasi Perkantoran	Dokumen	1	Tw 1	1	1	100		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.544.750.000	Tw 1	814.178.655	398.595.027	48,96			
					Tw 2	1						Tw 2	1.919.229.718					
					Tw 3	1						Tw 3	2.731.989.859					
					Tw 4	1						Tw 4	3.544.750.000					
2	Tersediannya kendaraan dinas yang layak	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	Unit	33	Tw 1	-	-	-		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	346.127.545	Tw 1	86.531.890	46.650.000	53,91			
					Tw 2	-						Tw 2	173.063.775					
					Tw 3	-						Tw 3	259.595.660					
					Tw 4	33						Tw 4	346.127.545					
		Jumlah Sewa Kendaraan operasional	Unit	2	Tw 1	2	2	100		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	384.903.950	Tw 1	96.225.992	42.280.000	43,94			
					Tw 2	2						Tw 2	192.451.978					
					Tw 3	2						Tw 3	288.677.964					
					Tw 4	2						Tw 4	384.903.950					
3	Tersedianya Dokumen keuangan dan aset	Jumlah Dokumen keuangan	Dokumen	1	Tw 1	1	1	100		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.541.650	Tw 1	5.886.000	5.880.160	99,90			
					Tw 2	1						Tw 2	11.772.000					
					Tw 3	1						Tw 3	17.658.000					
					Tw 4	1						Tw 4	23.541.650					
		Jumlah Dokumen Aset	Dokumen	1	Tw 1	1	1	100		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.937.000	Tw 1	1.837.000	-				
					Tw 2	1						Tw 2	79.937.000					
					Tw 3	1						Tw 3	79.937.000					
					Tw 4	1						Tw 4	79.937.000					
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.045.605	Tw 1	28.073.517	9.986.460	35,57			
												Tw 2	99.262.856					
												Tw 3	126.703.425					
												Tw 4	154.045.605					
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.058.235	Tw 1	8.016.000	5.073.860	63,30			
												Tw 2	16.032.000					
												Tw 3	24.048.000					
												Tw 4	32.058.235					
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.022.000	Tw 1	20.604.500	-				
												Tw 2	31.298.612					
												Tw 3	38.771.112					
												Tw 4	43.022.000					

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
										Pengadaan Mebel	38.137.000	Tw 1	18.172.000	-			
										Tw 2	38.137.000						
										Tw 3	38.137.000						
										Tw 4	38.137.000						
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71.322.970	Tw 1	19.261.395	13.643.615	70,83		
										Tw 2	36.615.395						
										Tw 3	53.969.395						
										Tw 4	71.322.970						
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.500.000	Tw 1	51.422.166	48.093.493	93,53		
										Tw 2	101.250.000						
										Tw 3	181.294.345						
										Tw 4	202.500.000						
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.400.000	Tw 1	57.400.000	3.419.600	5,96		
										Tw 2	114.550.000						
										Tw 3	171.700.000						
										Tw 4	228.400.000						
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231.779.945	Tw 1	58.254.955	35.455.475	60,86		
										Tw 2	116.689.991						
										Tw 3	174.944.937						
										Tw 4	231.779.945						
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	52.258.875	Tw 1	13.074.000	1.961.255	15,00		
										Tw 2	26.136.000						
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.240.000	Tw 1	33.206.250	3.008.500	9,06		
										Tw 2	36.217.500						
										Tw 3	39.228.750						
										Tw 4	42.240.000						
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.998.350	Tw 1	-	-			
										Tw 2	10.998.350						
										Tw 3	10.998.350						
										Tw 4	10.998.350						
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan																
1	Tersedianya Dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Dokumen	11	Tw 1	4	4	100		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.390.000	Tw 1	20.206.202	4.741.400	23,47		
					Tw 2	2						Tw 2	39.777.398				
					Tw 3	2						Tw 3	59.303.769				
					Tw 4	3						Tw 4	78.390.000				
2	tersedianya dokumen SAKIP	Jumlah Dokumen SAKIP	Dokumen	17	Tw 1	7	11	157,1429		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.860.320	Tw 1	49.228.437	20.813.650	42,28		
					Tw 2	2						Tw 2	86.439.064				
					Tw 3	5						Tw 3	123.649.691				
					Tw 4	3						Tw 4	160.860.320				

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
B.	Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin																
1.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat																
1	Tersedianya data PSKS, KT, TKSK, WKSBM, LK3, LKS dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya	Jumlah dokumen PSKS, KT, TKSK, WKSBM, LK3, LKS dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya	Dokumen	1	Tw 1	1	1	100		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	247.240.000	Tw 1	61.346.358	14.200.000	23,15		
2	Terlaksananya pemberian bantuan dan bimbingan kepada PSKS dan Panti Asuhan	Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	PSKS		Tw 2	1						Tw 2	123.872.572				
		Jumlah Panti Asuhan yang mendapat bantuan	Panti Asuhan		Tw 3	1						Tw 3	185.198.786				
					Tw 4	1						Tw 4	247.240.000				
2.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin																
1	Tersedianya data Fakir Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah dokumen Fakir Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Dokumen	1	Tw 1	1	1	100		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	290.324.600	Tw 1	75.031.068	15.695.450	20,92		
2	Terlaksananya pemberian bantuan kepada Fakir Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Kelompok		Tw 2	1						Tw 2	148.786.411				
		Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Orang		Tw 3	1						Tw 3	219.555.504				
					Tw 4	1						Tw 4	290.324.600				

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	Terlaksananya Pelatihan Pendampingan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Jumlah SDM Desa/Kelurahan yang dilatih	Desa/Kelu rahan	148	Tw 1	148	148	100			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	112.760.470	Tw 1	26.279.325	10.710.000	40,75	
3	Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga				Tw 2	148							Tw 2	61.176.150			
1	Tersedianya data jaminan sosial dan bantuan sosial	Jumlah dokumen jaminan sosial dan bantuan sosial	Dokumen	1	Tw 3	148							Tw 3	85.495.835			
2	Terlaksananya kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial	Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial			Tw 4	148							Tw 4	112.760.470			
C.	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial																
1.	Kepala Seksi Perlindungan Sosial																
1	Tersedianya data penanganan bencana dan kejadian luar biasa	Jumlah dokumen penanganan bencana dan kejadian luar biasa	Dokumen	1	Tw 1	1	1	100		Penyediaan Makanan	342.663.440	Tw 1	136.955.131	20.900.000	15,26		
2	Terlaksananya Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana	Jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada korban bencana	KK	650	Tw 2	1							Tw 2	178.351.049			
		Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan	Orang	5	Tw 3	1							Tw 3	223.576.967			
3	Terlaksananya pelatihan kebencanaan	Jumlah masyarakat yang memperoleh pelatihan kebencanaan			Tw 4	1							Tw 4	342.663.440			
2.	Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial																
1	Tersedianya data penduduk miskin	Jumlah dokumen penduduk miskin	Dokumen	1	Tw 1	1	1	100		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	179.040.860	Tw 1	42.928.077	10.800.000	25,16		
					Tw 2	1							Tw 2	106.625.014			
					Tw 3	1							Tw 3	150.144.751			

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak Dan Lanjut Usia																
1	Tersedianya data anak terlantar, lansia terlantar, anak nakal yang tersedia	Jumlah dokumen anak terlantar, lansia terlantar, anak nakal yang tersedia	Dokumen	1	Tw 1	1	1	100		Penyediaan Permakanan	230.772.630	Tw 1	34.470.050	6.600.000	19,15		
					Tw 2	1						Tw 2	73.303.800				
					Tw 3	1						Tw 3	102.229.550				
					Tw 4	1						Tw 4	230.772.630				
2	Terlaksananya pemberian bantuan PMKS	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan bantuan	Orang	262	Tw 1	262	262	100		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	173.260.000	Tw 1	39.485.240	13.200.000	33,43		
					Tw 2	262						Tw 2	89.692.160				
					Tw 3	262						Tw 3	125.801.080				
					Tw 4	262						Tw 4	173.260.000				
3	Terlaksananya pelatihan PMKS	Jumlah anak nakal, anak terlantar yang dilatih	Orang	147	Tw 1	147	-	-									
					Tw 2	-											
					Tw 3	-											
					Tw 4	-											
2.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas																
1	Tersedianya data penyandang disabilitas	Jumlah dokumen penyandang disabilitas	Dokumen	1	Tw 1	1	1	100		Penyediaan Alat Bantu	87.560.000	Tw 1	31.955.760	20.900.000	65,40		
					Tw 2	1						Tw 2	60.168.840				
					Tw 3	1						Tw 3	76.896.920				
					Tw 4	1						Tw 4	87.560.000				
2	Terlaksananya pemberian bantuan kepada PMKS	Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan bantuan	Orang	355	Tw 1	355	-	-		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	335.432.000	Tw 1	28.746.520	20.900.000	72,70		
					Tw 2	-						Tw 2	96.111.680				
					Tw 3	-						Tw 3	149.856.840				
					Tw 4	-						Tw 4	335.432.000				
3	Terlaksananya pelatihan PMKS	Jumlah penyandang disabilitas yang dilatih	Orang	80	Tw 1	80	-	-									
					Tw 2	-											
					Tw 3	-											
					Tw 4	-											
3.	Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial																
1	Tersedianya data tuna sosial	Jumlah dokumen tuna sosial	Dokumen	1	Tw 1	1	1	100		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.560.000	Tw 1	9.675.164	20.900.000	216,02		
					Tw 2	1						Tw 2	27.566.776				
					Tw 3	1						Tw 3	34.228.388				
					Tw 4	1						Tw 4	39.560.000				

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Terlaksananya pemberian bantuan PMKS	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	ODHA/Gepeng	40/100	Tw 1	40/100	40/100	100		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	107.560.000	Tw 1	24.520.505	20.900.000	85,23		
					Tw 2	40/100						Tw 2	59.580.840				
					Tw 3	40/100						Tw 3	90.526.920				
					Tw 4	40/100						Tw 4	107.560.000				
3	Terlaksananya pelatihan PMKS	Jumlah eks napi yang dilatih	Orang	10	Tw 1	10	10	100									
					Tw 2	10											
					Tw 3	10											
					Tw 4	10											



Singaraja, 5 April 2021

Kepala Dinas Sosial Kab. Buleleng

I Putu Ketut Iriaman Putra,S.Sos,MM

Fembina Tk.I (IV/b)

NIP.196912311991031053

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9.	<i>Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah</i>																
1	Tersedianya draf dokumen Hibah / Bansos	1	Jumlah draf dokumen Hibah / Bansos	Dokumen	1	Triwulan I 1,00	1,00	100,00									
						Triwulan II 1,00	-	-									
						Triwulan III 1,00	-	-									
						Triwulan IV 1,00	-	-									
10.	<i>Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah</i>																
1	Tersedianya draf dokumen Hibah / Bansos	1	Jumlah draf dokumen Hibah / Bansos	Dokumen	1	Triwulan I 1,00	1,00	100,00									
						Triwulan II 1,00	-	-									
						Triwulan III 1,00	-	-									
						Triwulan IV 1,00	-	-									
11.	<i>Pengelola Kebutuhan Logistik</i>																
1	Tersedianya laporan barang logistik	1	Jumlah dokumen persediaan barang logistik bencana	Dokumen	1	Triwulan I 1,00	1,00	100,00									
						Triwulan II 1,00	-	-									
						Triwulan III 1,00	-	-									
						Triwulan IV 1,00	-	-									
2	Tersedianya draf dokumen usulan permintaan barang logistik bencana	1	Jumlah draf dokumen usulan permintaan barang logistik bencana	Dokumen	1	Triwulan I 1,00	1,00	100,00									
						Triwulan II 1,00	-	-									
						Triwulan III 1,00	-	-									
						Triwulan IV 1,00	-	-									
12.	<i>Pengadministrasi Sarana dan Prasarana</i>																
1	Tersedianya pengadministrasian sarana dan prasarana logistik	1	Jumlah dokumen pengadministrasian sarana dan prasarana logistik	Dokumen	1	Triwulan I 1,00	1,00	100,00									
						Triwulan II 1,00	-	-									
						Triwulan III 1,00	-	-									
						Triwulan IV 1,00	-	-									

Singaraja, 5 April 2021

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



I Putu Kariaman Putra, S.Sos,MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 196912311991031053